

## Analisis Komparasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Merangin Dan Sarolangun

Lenny Karwaty

Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi

### Abstract

*This research is entitled Comparative Analysis of Parking Levy Revenue in Merangin and Sarolangun Regency under the guidance of Parmadi SE, ME. The purpose of the study is to determine the amount of Parking Levy Effectiveness, and to determine the amount of Contribution of Parking Levy Revenue in the Formation of Local Levies, in addition also to determine the difference in the Ability of Parking Levy Revenue in the Formation of Local Levies in Merangin and Sarolangun Regency during the period 2009-2013. The data used in this study are data of Local Retribution, Parking Retribution, Local Revenue, which are sourced from BPS Merangin and Sarolangun Regency. Data analysis using t-Test analysis: Two Sample Assuming Equal Variances. The results of this analysis prove that there are differences in the ability of parking levy revenue in the formation of local retribution seen from the amount of contribution for 5 (five) years. Merangin Regency has an average of 4.28 percent and Sarolangun of 0.52 percent, in the calculation of the t-Test difference test there is a difference of 3.76 percent.*

**Keywords:** Comparison, Revenue, Parking Levy

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Komparasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Merangin dan Sarolangun dibawah bimbingan Parmadi SE., ME. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui besaran Efektifitas Retribusi Parkir, dan untuk mengetahui besaran Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir dalam Pembentukan Retribusi Daerah, selain itu juga untuk mengetahui Perbedaan Kemampuan Penerimaan Retribusi Parkir dalam Pembentukan Retribusi Daerah di Kabupaten Merangin dan Sarolangun selama periode 2009-2013. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Retribusi Daerah, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, yang bersumber dari BPS Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Analisis data menggunakan analisis t-Test : Two Sample Assumsing Equal Variances. Hasil analisis ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan penerimaan retribusi parkir dalam pembentukan retribusi daerah dilihat dari jumlah kontribusi selama 5 (lima) tahun. Kabupaten Merangin memiliki rata-rata sebesar 4,28 persen dan Sarolangun sebesar 0,52 persen, dalam perhitungan Uji beda t-Test terdapat selisih sebesar 3,76 persen.

**Kata Kunci :** Komparasi, Penerimaan, Retribusi Parkir

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia di satu sisi telah membawa dampak pada tingkat kemiskinan, namun disisi lain krisis tersebut telah membuka jalan munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Era reformasi yang telah terjadi ternyata membawa hikmah positif bagi daerah dimana selama ini dominasi pusat terhadap daerah begitu kuat sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem

sentralistik kepada sistem desentralisasi menuju otonomi daerah makin kuat. Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001, Otonomi daerah semakin gencar baik merupakan retorika elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan Kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi daerah mampu memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada diwilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi memaksa daerah untuk mandiri karena pembiayaan/pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi akan terasa berat. Beban yang dimaksud, misalnya pajak dan retribusi yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi. *SELF SUPPORTING* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan/bantuan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Ketika Pemerintah Daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dimana untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan Sarolangun merupakan daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PAD Kabupaten Merangin pada periode 2009-2013 mengalami peningkatan maupun penurunan dan bisa dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ketahun dalam perkembangan realisasi. Pada tahun 2009 sebesar Rp. 32.710.601.617,49,-. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 17.006.559.750,23,-. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 21.886.503.473,46,-. Kemudian Pada tahun 2012 sebesar Rp. 23.013.460.568,32,-. Pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 40.020.045.729,60,-. Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin dapat dilihat pertumbuhan rata-rata selama periode 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 11,95 %.

Pada Kabupaten Sarolangun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat dilihat dalam bentuk perkembangan realisasi. Pada tahun 2009 sebesar Rp. 20.990.150.000.00,-. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 25.183.715.487,-. Pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 26.896.483.592,-. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 30.150.000.000,-. Kemudian pada tahun 2013 sebesar Rp. 31.293.482.000,-. Berdasarkan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pertumbuhan rata-rata selama periode 2009-2013 adalah 8,53 %.

Salah satu sumber PAD adalah retribusi daerah, salah satu retribusi daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor adalah retribusi parkir. Akan tetapi, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara potensial oleh pemerintah daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas yang menangani masalah retribusi parkir.

Pada retribusi parkir kabupaten merangin selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan antara target dan realisasi yang ditetapkan dari tahun 2009-2013, di tahun 2009 ditargetkan sebesar rp. 8.400.000,00-, terealisasi sebesar rp. 21.000.000,00-, dengan pencapaian 250,00 persen. pada tahun 2010 ditargetkan sebesar rp. 8.400.000,00-, terealisasi sebesar rp. 2.900.000,00-, dengan pencapaian 34,52 persen. pada tahun 2011 ditargetkan sebesar rp. 8.400.000,00-, terealisasi sebesar rp. 8.400.000,00-, dengan pencapaian 100,00 persen. pada tahun 2012 ditargetkan rp. 42.000.000,00-, terealisasi sebesar rp. 58.235.000,00-, dengan pencapaian 138,65 persen. dan pada tahun 2013 target sebesar rp. 40.000.000,00-, terealisasi sebesar rp. 41.700.000,00-, dengan pencapaian 104,25 persen. sehingga kabupaten merangin memiliki rata-rata 125,484 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada Retribusi parkir Kabupaten Sarolangun Selama 5 (lima) tahun terakhir dalam pencapaian target dan realisasi tahun 2009-2013, ditahun 2009 retribusi parkir di Kabupaten Sarolangun target sebesar Rp. 25.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 13.900.000-, dengan pencapaian 55,6 persen. Pada tahun 2010 target sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.33.200.000-, dengan pencapaian 132,8 persen. Tahun 2011 target sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.000.000-, dengan pencapaian 100,00 persen. Pada tahun 2012 target sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.600.000-, dengan pencapaian 62,67 persen. Dan pada tahun 2013 target 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.000.000-, dengan pencapaian 58,33 persen. Dan Kabupaten Sarolangun memiliki rata-rata 81,88 persen. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua Kabupaten tersebut memiliki perbedaan penerimaan retribusi parkir pada Kabupaten

Merangin dengan pencapaian 125,484 persen, sedangkan Kabupaten Sarolangun mencapai 81,88 persen.

Disisi lain, masalah pelayanan parkir menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban petugas pemungut/juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan memperlmainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga pada keadaan ini adanya kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk ke PAD. Akibatnya retribusi parkir memberikan kontribusi yang masih relatif kecil terhadap PAD dan pelayanan parkir yang belum memadai. Dengan demikian perlu kiranya Dinas terkait melalui para Koordinator Lapangan Kabupaten Merangin dan Sarolangun secara sungguh-sungguh mencari upaya untuk meningkatkan retribusi parkir.

Berdasarkan latar belakang diatas, dilihat dari prospek yang ada maka dipilih judul penelitian ini adalah “*Analisis Komparasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Merangin dan Sarolangun*”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Keuangan Daerah**

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

#### **Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang No 34 tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### **Retribusi Parkir**

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### **Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir**

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

#### **Rasio Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir**

Rasio efektifitas penerimaan retribusi parkir dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan retribusi parkir dengan target penerimaan retribusi parkir (dianggarkan).

## **METODELOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan

informasi (keterangan) dari objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna (Andi.2007)

**Jenis Data dan Sumber Data**

**Jenis Data**

Dalam penelitian digunakan data sekunder yang merupakan data berkala (*time series*) dari tahun 2009-2013. Data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Data sekunder tersebut meliputi :

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Data Penerimaan Retribusi Daerah
3. Data Penerimaan Retribusi Parkir

**Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun dan Merangin
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun dan Merangin
3. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sarolangun dan Merangin

**Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan statistic karena berupa angka-angka yang kemudian dijelaskan dan interprestasikan dalam satu uraian. Sedangkan analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model statistic, karena sekedar membaca tabel-tabel, grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran (Sugiyono, 2009).

**Alat Analisis Data**

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sarolangun dan Merangin pertahunnya maka digunakan rasio efektifitas dengan cara membandingkan antara pencapaian realisasi dengan target yang dihitung pada suatu objek tertentu dalam setiap tahunnya. Maka digunakan formulasi Mahmudi sebagai berikut :

$$EPD = \frac{RPD}{TPD} \times 100\%$$

Dan dapat disederhanakan menjadi :

$$ERPt = \frac{NTRPt}{NRRPt} \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

- ERPt : Efektifitas retribusi parkir
- NTRPt : Nilai target retribusi parkir
- NRRPt : Nilai realisasi retribusi parkir

2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam pembentukan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, maka digunakan formulasi (1) menurut Mahmudi sebagai berikut:

NRP

$$KRP = \frac{NRD}{NRD} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana :

KRP : Kontibusi Retribusi Parkir

NRP : Nilai retribusi parkir

NRD : Nilai retribusi daerah

- Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan penerimaan retribusi parkir dalam pembentukan retribusi daerah pada periode tahun 2009-2013 digunakan alat uji beda rata-rata (*t<sub>test</sub>*). Dalam hal ini retribusi parkir Kabupaten Merangin dianggap sebagai periode sebelum pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, dan retribusi parkir Kabupaten Sarolangun dianggap periode sesudah anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu dapat digunakan uji beda dua rata-rata pada sampel yang independen dengan rumus seperti yang dikemukakan oleh Sugiarto (2000) yaitu :

$$t_{test} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - D_0}{Sp \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$Sp = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Dimana :

$\bar{X}_1$  = rata-rata kemampuan penerimaan retribusi parkir dalam pembentukan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 Kabupaten Merangin

$\bar{X}_2$  = rata-rata kemampuan penerimaan retribusi parkir dalam pembentukan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 Kabupaten Sarolangun

$D_0 = 0$

Sp = Standar Parometer

S = Standar Deviasi

n = Jumlah Sampel

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel Uji Beda t-Test Analisis Perbedaan Tingkat Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pembentukan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin dan Sarolangun Selama Periode 2009-2013**

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	Merangin	Sarolangun
Mean	4,286445717	0,524385244
Variance	44,08207691	0,022489206
Observations	5	5
Pooled Variance	22,05228306	
Hypothesized Mean Difference	1	
Df	8	
t Stat	0,929985994	

P(T<=t) one-tail	0,189792781
t Critical one-tail	1,859548033
P(T<=t) two-tail	0,379585562
t Critical two-tail	2,306004133

Berdasarkan hasil uji beda diketahui bahwa t hitung (2,306004133) lebih besar dari t tabel (0,929985995) berarti H<sub>0</sub> ditolak atau dengan kata lain terdapat perbedaan secara nyata dari kemampuan penerimaan tingkat kontribusi retribusi parkir dalam pembentukan retribusi daerah antara Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Begitu juga dengan nilai probabilitas (0,379585562) lebih besar  $\alpha$  (0,05) yang berarti H<sub>0</sub> ditolak atau kemampuan penerimaan tingkat kontribusi retribusi parkir dalam pembentukan retribusi daerah antara Kabupaten Merangin dan Sarolangun terdapat perbedaan secara signifikan (nyata).

### KESIMPULAN

1. Rata-rata efektifitas penerimaan retribusi parkir Kabupaten Merangin adalah sebesar 125,48 persen, dan efektifitas terbesar retribusi parkir terjadi pada tahun 2012 yaitu 138,65 persen dan efektifitas terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 34,52 persen. Pada Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 81,88 persen, dan efektifitas terbesar penerimaan retribusi parkir pada tahun 2010 yaitu sebesar 132,8 persen dan efektifitas retribusi parkir terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 55,6 persen.
2. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap retribusi daerah Kabupaten Merangin adalah sebesar 4,29 persen, dan kontribusi terbesar retribusi parkir terhadap retribusi daerah pada tahun 2012 yaitu sebesar 16,04 persen dan kontribusi terendah retribusi parkir terhadap retribusi daerah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,31 persen. Pada Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 0,52 persen, dan kontribusi terbesar penerimaan retribusi parkir terhadap retribusi daerah adalah pada tahun 2012 sebesar 0,73 persen dan kontribusi terendah penerimaan retribusi parkir terhadap retribusi daerah adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,34 persen.
3. Berdasarkan Analisis perbandingan antara Kabupaten Merangin dan Sarolangun terdapat **perbedaan yang signifikan** (nyata) dapat dilihat dari jumlah penerimaan kontribusi Kabupaten Merangin sebesar 4,29 persen dan Sarolangun sebesar 0,52 persen, kemudian jika dilihat dari hasil t-Test : Two Sample Assumsing Equal Variances terdapat selisih rata-rata sebesar **3,76** persen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ambia M S, 2010. *Kajian Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Retribusi Parkir Ditepi Jalan (On-Street Parking) Kota Banda Aceh*. Skripsi.
- Andi S, 2007. *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Edisi Revisi PUSTAKA
- Hendarji, 2010. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Kawasan dan Luar Kawasan Kota Jambi*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA, Jambi.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*, Yogyakarta.
- Rahmadi, S. 2010. *Analisis Keuangan Daerah*, Universitas Jambi.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : ALFABETA,cv.
- Sugiarto, 2000. *Statistik Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta